

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN NILAI IKPA PADA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sutanto¹, Cris Kuntadi², R. Luki Karunia³

¹ Mahasiswa Magister Politeknik STIA LAN Jakarta, email: sutantos1602@gmail.com

² Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta, Email: luki@stialan.ac.id

Corresponding author: Sutanto¹

| Received: 15-10-2024

| Revised: 16-10-2024

|| Accepted: 17-10-2024

Abstract:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan digunakan sebagai alat ukur, pemantauan, dan mengevaluasi kinerja anggaran dilingkup instansi pemerintah. Saat ini masih ada 11 Kementerian/Lembaga dengan capaian nilai IKPA berkategori cukup. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi literatur untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi capaian nilai IKPA pada Kementerian/Lembaga. Penelitian sebelumnya yang relevan digunakan sebagai penguat teori, ide, maupun fenomena yang berkaitan dan berpengaruh terhadap variabel-variabel penelitian. Dalam artikel ini disampaikan hasil revidi bagaimana koordinasi, kompetensi SDM dan komunikasi mempengaruhi capaian nilai IKPA. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel studi literatur ini adalah: 1) koordinasi berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA ; 2) kompetensi SDM berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA; dan 3) komunikasi berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA.

Keywords: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, koordinasi, kompetensi SDM, komunikasi



Introduction

Seluruh instansi pemerintah dan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, masing-masing lembaga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN secara transparan dan akuntabel kepada publik melalui laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik melalui website K/L. Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendorong setiap K/L untuk memastikan agar belanja negara dikelola berdasarkan salah satu konsep ekonomi yakni value for money (VFM) yang merujuk pada kombinasi optimal dari pengeluaran atau harga (cost) dan kualitas barang atau jasa yang didapatkan. Saat konsep ini diterapkan di sektor publik maka perspektif VFM digambarkan sebagai kondisi yang seimbang antara pengeluaran Pemerintah dan benefit yang diterima oleh masyarakat.

Dalam mengaplikasikan pendekatan VFM, setiap K/L menekankan pada upaya mendapatkan nilai tertinggi dari setiap rupiah yang dipergunakan. Untuk mengetahui perbandingan nilai dan rupiah tersebut, Kementerian Keuangan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran di seluruh K/L. IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Selanjutnya capaian nilai IKPA dapat dikategorikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No	Nilai IKPA	Kategori
1	Diatas atau sama dengan 95	Sangat Baik
2	89 sampai dengan kurang dari 95	Baik
3	70 sampai dengan kurang dari 89	Cukup
4	kurang dari 70	Kurang

Tabel 1. Kategori Nilai IKPA

IKPA mempunyai tiga aspek utama. Pertama, aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. Revisi DIPA yang berbobot 10 % dan deviasi halaman III DIPA yang berbobot 15% merupakan indikator yang termasuk dalam aspek kualitas perencanaan anggaran. Jumlah revisi DIPA terhadap pagu tetap dapat menunjukkan kualitas perencanaan anggaran di Kementerian/Lembaga. Indikator deviasi halaman III DIPA menunjukkan keakuratan realisasi pencairan dana terhadap rencana penarikan dana (RPD) per jenis belanja per bulan. Semakin kecil deviasi menunjukkan semakin akurat perencanaannya.

Kedua, aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari penyerapan anggaran yang mempunyai bobot 20%, belanja kontraktual berbobot 10%, ketepatan waktu terhadap tagihan yang diselesaikan berbobot 10%, pengelolaan uang persediaan (UP) & tambahan uang persediaan (TUP) berbobot 10%. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran bertujuan agar setiap K/L melakukan percepatan belanja berdasarkan pola realisasi anggaran triwulan per jenis belanja sesuai RPD, mendorong percepatatan penandatanganan dan belanja kontraktual pada awal periode triwulan, mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual, meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP & TUP, optimalisasi penggunaan UP & TUP, mendorong penggunaan UP KKP, serta meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

Ketiga, aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang terdiri dari capaian output dengan bobot 25%. Sasarannya adalah mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas.

Nilai IKPA dapat menjadi gambaran kualitas pelaksanaan anggaran di Instansi Pemerintah. Selain itu, IKPA juga dimanfaatkan oleh Kemenpan RB sebagai pengungkit nilai Reformasi Birokrasi di setiap K/L. Pada tahun 2023 secara nasional terdapat 11 K/L (13%) dengan capaian IKPA kategori Cukup, 54 K/L (66%) berkategori Baik, dan 17 K/L (21%) berkategori sangat baik. Sedangkan rata-rata capaian IKPA secara nasional adalah 94,26 (sumber : Kementerian Keuangan, 2024). Pemerintah mempunyai target nilai IKPA seluruh K/L berkategori minimal baik.

Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian nilai IKPA diantaranya kurangnya koordinasi, kualitas SDM, perencanaan anggaran, regulasi, komitmen organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, kesatuan komando, lingkungan birokrasi dan administrasi. Dalam konteks instansi pemerintah, komitmen organisasi, sumberdaya manusia, regulasi pemerintah, dan koordinasi dapat mempengaruhi capaian nilai IKPA (Ika et al., 2023). Kuntadi (2023) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran yaitu sistem pengukuran kinerja, dukungan organisasi serta faktor individu. Sedangkan penelitian Nazma (2024) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab ketidakakuratan PPK dalam menyusun dokumen rencana penarikan (RPD) adalah karena komunikasi internal yang lemah, dengan data yang kurang akurat maka deviasi antara rencana serapan anggaran dengan realisasi anggaran menjadi semakin besar. Besarnya deviasi ini tentunya mengakibatkan nilai IKPA menjadi rendah.

Artikel ini membahas pengaruh koordinasi, kompetensi SDM, dan komunikasi terhadap capaian nilai IKPA, suatu studi literature review dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu :

1. Apakah koordinasi berpengaruh terhadap capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ?
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ?
3. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ?

Literature Review

Kinerja (Performance)

Kata kinerja telah banyak di definisikan oleh para ahli. Menurut Moehariono (2012) dalam Puspita (2023) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. World bank (2014) mengategorikan kinerja organisasi sektor publik ke dalam dua aspek yaitu 1) kinerja dalam proses perumusan anggaran dan perencanaan program; 2) kinerja dalam aspek pelaksanaan (Santosa & Akbar, 2021). Dengan demikian dalam perspektif sektor publik, kinerja anggaran merupakan tool yang penting untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan metode, tergantung pada tujuan dan konteks yang diukur, seperti Key Performance Indicators (KPI), Balanced Scorecard. Mahmudi (2005) dalam Kurnianto (2018) mengatakan bahwa, indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kementerian Keuangan menggunakan IKPA sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi kualitas belanja Kementerian/Lembaga.

Koordinasi (X1)

Begum dan Momen (2019) dalam Nainggolan et al.,(2021) mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses mengintegrasikan, menyelaraskan, dan mengarahkan berbagai kegiatan atau usaha

yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Hal yang paling utama dalam koordinasi adalah adanya pembagian tugas yang jelas antar bagian maupun sampai dengan level individu pegawai. Shafritz & Hyde (2015 :107) mengemukakan bahwa jika pembagian pekerjaan tidak dapat dihindari, maka koordinasi menjadi keharusan. Koordinasi dapat dicapai dengan cara pengorganisasian, yaitu dengan menghubungkan pembagian tugas berdasarkan level manajerial dari pimpinan unit kerja sampai dengan pegawai teknis. Koordinasi antar unit kerja eselon II mempunyai peran penting untuk mencapai target nilai IKPA yang telah ditetapkan oleh setiap K/L. Koordinasi yang lemah antar bagian dapat mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan anggaran seperti tingginya gap antara rencana belanja dengan realisasinya, dan rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratnasari (2022) yang menyatakan bahwa koordinasi internal bagian yang lemah menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya gap antara rencana penarikan dana dengan realisasi belanja.

Kompetensi SDM (X2)

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh penting terhadap kinerja anggaran. Pengelolaan anggaran yang efektif membutuhkan pegawai yang kompeten, memahami manajemen keuangan publik, serta memiliki kemampuan teknis pemahaman terhadap regulasi. Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Efektifitas kinerja sangat erat kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Hutapea dan Thoha (2008) dalam Bay et al. (2019) mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang mempengaruhi kompetensi yaitu :

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu pemahaman seseorang tentang konsep, fakta, dan teori yang relevan dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan, misalnya penguasaan terhadap aplikasi komputer, dan pemahaman peraturan.
2. Keterampilan (skills), yaitu individu pegawai yang memiliki suatu kemampuan dan keterampilan baik secara teknis maupun non-teknis/praktis.
3. Sikap (attitude), yaitu perilaku, dan etika kerja yang mempengaruhi cara seseorang dalam bekerja termasuk cara merespon terhadap pengaruh dari luar, misalnya pemberian insentif.

Merujuk pada penelitian Afifah (2021) dalam Anggita dan Budi (2023) menyatakan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kualitas SDM, dimana penyerapan anggaran merupakan salah satu aspek penilaian IKPA.

Komunikasi (X3)

Banyak para ahli telah mendefinisikan kata komunikasi. Menurut Anderson dalam Zidan et al. (2023) mendefinisikan komunikasi sebagai proses pertukaran pengalaman atau informasi antara dua orang atau lebih. Pertukaran informasi tersebut dapat memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers yang mengemukakan komunikasi adalah proses mengalihkan ide yang berasal dari suatu sumber kepada satu penerima atau lebih, yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku mereka (Deddy Mulyana, 2003:62) dalam Zidan et al. (2023).

Dalam era di mana informasi mengalir dengan cepat dan interaksi antar individu semakin kompleks, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif menjadi kunci utama bagi kelangsungan dan keberhasilan suatu entitas. Komunikasi tidak hanya mengacu pada penyampaian informasi, melainkan juga melibatkan pemahaman, respons, dan kemampuan untuk memotivasi serta membangun hubungan yang kokoh di antara anggota tim (Setiyanto, 2013) dalam Zidan et al. (2023). Dengan demikian komunikasi efektif dapat mempengaruhi orang lain untuk juga meningkatkan kinerja.

Table 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	(Kuntadi & Cheria Puspita, 2023)	Sistem pengukuran kinerja (x_1), Dukungan Organisasi(x_2), dan Faktor Individual (x_3)berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran (y)	Meneliti pengaruh kompetensi SDM terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Meneliti pengaruh sistem pengukuran kinerja, dan faktor individual terhadap kinerja pelaksanaan anggaran
2	(Ika et al., 2023.)	Komitmen organisasi (x_1), regulasi pemerintah (x_3) dan koordinasi (x_4) berpengaruh positif terhadap pencapaian nilai IKPA Satuan Kerja Pada KPPN Manado (y), namun sumberdaya manusia (x_2) tidak berpengaruh terhadap pencapaian nilai IKPA	Meneliti pengaruh kompetensi SDM dan koordinasi terhadap pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Meneliti pengaruh regulasi pemerintah terhadap capaian capaian nilai IKPA
3	(Anggita & Budi, 2023)	Perencanaan Anggaran (x_1), Kualitas SDM (x_2), Pengadaan Barang dan Jasa (x_3), Pelaksanaan Anggaran (x_4) berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (y)	Meneliti pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran selanjutnya mempengaruhi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Meneliti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran, berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
4	Arnida (2022)	Kompetensi SDM (x_1), penugasan berganda (x_2), adanya pagu anggaran yang diblokir (x_3), realokasi anggaran (x_4) dan proses revisi terpusat (x_5)berpengaruh terhadap deviasi halaman III DIPA (y) yang berdampak pada nilai IKPA pada satuan kerja lingkup Kementerian Agama Bangka Belitung	Meneliti kompetensi SDM terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Meneliti pengaruh penugasan berganda, pagu blokir, refocusing anggaran, dan proses revisi terpusat terhadap deviasi halaman III DIPA

.5	Nazma (2024)	Kompetensi SDM (x_1), komunikasi internal (x_2), berpengaruh terhadap Penyerapan anggaran (y) sehingga berdampak pada nilai IKPA pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Meneliti pengaruh kompetensi SDM, komunikasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Penelitian berfokus pada pengaruh kompetensi SDM, dan komunikasi terhadap penyerapan anggaran
6	Ratnasari (2022)	Perencanaan anggaran (x_1), koordinasi internal antar bagian (x_2), dan keterbatasan kompetensi SDM (x_3) mengakibatkan terjadinya <i>gap</i> antara rencana penarikan anggaran dengan realisasi belanja satuan kerja K/L (y) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	Koordinasi, kompetensi SDM berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Perencanaan anggaran yang belum ideal berpengaruh terhadap deviasi antara rencana dengan realisasi belanja satker.

Method

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menelaah beberapa teori dan mengkaji pengaruh antar variabel dari jurnal yang diperoleh melalui google scholar maupun publisher jurnal ilmiah online.

Setelah menelaah berbagai jurnal yang relevan, kemudian dianalisa dengan narasi yang menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran. Kekurangan penelitian ini tidak dilakukan pengujian terhadap variabel independen nya. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan terhadap kondisi kinerja pelaksanaan anggaran.

Results and Discussion

Berdasarkan hasil penelaahan terkait teori dan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan maka pembahasan artikel adalah sebagai berikut :

Pengaruh koordinasi (x_1) terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (y)

Koordinasi yang baik antar unit kerja maupun individu memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga. Dengan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, menghindari tumpang tindih pekerjaan, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, koordinasi dapat membantu organisasi mencapai kinerja keuangan yang ditetapkan organisasi. Dengan demikian diperlukan deskripsi pekerjaan pegawai yang jelas terkait tugas dan wewenang serta tanggungjawab pada setiap bagian atau level jabatan sesuai standar organisasi (Marsinta, 2021).

Dalam perencanaan anggaran yang merupakan salah satu aspek penilaian IKPA, maka koordinasi antar bagian dalam menyusun rencana penarikan dana (RPD) menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pencapaian nilai IKPA. Menurut Ratnasari (2022) koordinasi internal antar bagian yang lemah menjadi salah satu faktor utama tingginya gap antara rencana dan realisasi belanja. Hasil penelitian (Ika et al., 2023) menunjukkan bahwa koordinasi memiliki hubungan positif (searah) terhadap pencapaian

nilai IKPA. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Kuntadi dan Rosdiana (2022), dan Husniati et.al (2018) bahwa koordinasi berpengaruh pada efektifitas penyerapan anggaran.

Pengaruh kompetensi SDM (x2) terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (y)

Kompetensi SDM memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja anggaran dalam berbagai aspek, mulai dari penyusunan anggaran yang lebih akurat, pelaksanaan tas perencanaan anggaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran. SDM yang kompeten dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi, sebaliknya kompetensi SDM yang kurang menyebabkan kinerja atau maupun tata kelola anggaran menjadi kurang berkualitas juga.

Kompetensi SDM terkait pemahaman terhadap regulasi tata kelola penganggaran masih menjadi kendala di Kementerian/Lembaga. Penelitian Arnida (2022) mengemukakan bahwa keterbatasan SDM yang memahami pengelolaan keuangan dan menguasai aplikasi menjadi kendala di hampir seluruh satker. Hal ini sejalan dengan penelitian Nazma (2024) bahwa kompetensi SDM yang tidak suport menjadi salah satu kendala dalam penyerapan anggaran.

Untuk meningkatkan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, maka pimpinan disetiap unit kerja perlu memastikan bahwa anggaran disusun, dikelola, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dicapai apabila pada individu SDM terutama para pengelola keuangan memahami peraturan keuangan. Djakaria (2019) dalam Kuntadi dan Puspita (2023) menyimpulkan bahwa faktor individu berpengaruh terhadap kinerja KPPN Waingapu. Beberapa hasil penelitian yang menyatakan kompetensi SDM berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA adalah hasil penelitian yang dilakukan Arnida (2022), Anggita dan Budi (2023), Kuntadi dan Puspita (2023)

Pengaruh komunikasi (x3) terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (y)

Komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja anggaran dalam sebuah organisasi. Untuk mencapai target IKPA yang telah ditetapkan oleh instansi maka diperlukan komunikasi yang efektif di semua unit kerja. Komunikasi yang baik mendukung efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan memastikan bahwa informasi terkait anggaran disampaikan secara jelas dan tepat waktu, setiap unit kerja dapat berkontribusi pada pencapaian kinerja anggaran yang optimal. Komunikasi yang baik antar berbagai pelaku pengelola keuangan mulai dari staff sampai dengan pimpinan akan berdampak pada peningkatan semangat kerja dan produktivitas karyawan dalam sebuah organisasi (Ika et al., 2023).

Kendala dalam komunikasi antar unit kerja dapat mempengaruhi kualitas dokumen rencana penarikan dana (RPD). Hal ini selaras dengan penelitian Nazma (2024) yang menemukan bahwa komunikasi yang lemah menyebabkan kendala penyerapan anggaran.

Untuk meningkatkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan komunikasi, maka yang harus dilakukan oleh manajemen adalah memastikan komunikasi antar bidang berjalan secara efektif, dimana komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas, kerjasama tim, inovasi, retensi karyawan dalam organisasi profesional (Kuntadi dan Nainggolan, 2023). Penelitian Zidan et.al (2023) mengungkapkan bahwa komunikasi efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, hal ini sejalan dengan penelitian Fuadah & Masrukhan, setiyanto (2013), sembiring (2017).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan representasi atau diagram yang menggambarkan hubungan antar variabel yang berkaitan dalam suatu penelitian. Kerangka ini dapat memandu penulis atau peneliti dalam menyusun hipotesis, dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana penelitian dirancang dan diimplementasikan. Artikel ini menguraikan pengaruh koordinasi, kompetensi SDM, dan komunikasi terhadap capaian nilai IKPA pada Kementerian/Lembaga. Merujuk pada rumusan masalah, telaah teori, riset terdahulu yang relevan dan

pembahasan pengaruh antar variabel, maka kerangka konseptual artikel ini nampak seperti pada gambar diagram dibawah ini :

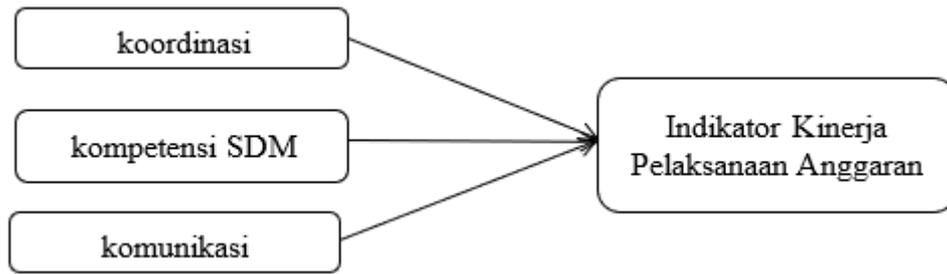


Figure 1. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan diagram kerangka konseptual di atas, koordinasi, kompetensi SDM, dan komunikasi berpengaruh terhadap capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Selain pengaruh dari 3 (tiga) variabel terhadap capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi capaian nilai IKPA diantaranya adalah:

- a) Dukungan organisasi : (Kuntadi dan Puspita, 2022)
- b) Sistem Pengukuran Kinerja : (Kuntadi dan Puspita, 2022)
- c) Komitmen Organisasi : (Ika et.al, 2023)
- d) Regulasi Pemerintah : (Ika et.al,, 2023)
- e) Pengadaan Barang dan Jasa: (Anggita dan Budi, 2023)

Conclusion

Rumusan hipotesis yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut :

1. koordinasi mempengaruhi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
2. kompetensi SDM mempengaruhi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran .
3. komunikasi mempengaruhi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Acknowledgement

Merujuk pada pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran guna perbaikan atau kajian penelitian selanjutnya yaitu masih terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi capaian nilai IKPA selain faktor yang telah diuraikan dalam artikel ini yaitu koordinasi, kompetensi SDM, dan komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penelaahan atau kajian selanjutnya guna mendapatkan faktor apasaja yang mempengaruhi capaian nilai IKPA. Faktor lain tersebut seperti dukungan organisasi, komitmen organisasi, pengadaan barang dan jasa, sistem pengukuran kinerja, regulasi pemerintah.

References

- Anggita, M., & Budi, A. (2023). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1339-1350. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16016>
- Bay, P. G., Elerina, M., & Tunti, D. (2019). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang).
- Ika, S., Manangin, N., Tinangon, J., Gamaliel, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus, J. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Pada KPPN Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*

"GOODWILL (Vol. 14, Issue 2).

- Keuangan, K., & Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka, K. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung Arnida Arnida. 4(1). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i1>
- Kuntadi, C., & Cheria Puspita, G. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2>
- Kuntadi, C., & Puspita, G. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2>
- Kurnianto. (2018). ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU.
- Nazma, A. N. (2024). Evaluasi Penyerapan Anggaran Sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Studi Kasus Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung). *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(3), 225–233. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i3.2258>
- S. Anggita, & Y. A. B. Budi. (2023). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1339–1350. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16016>
- Santosa, B., & Akbar, R. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *Accounting and Business Information System Journal*, 9.
- Shafritz, J., & Hyde, A. (2015). *Classics of public administration*.
- Uli Nainggolan, M., & Rosita. (2021). Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening (The Effect of Coordination on Performance With Satisfaction as Intervening Variable). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 10(02).
- Zidan, M., Budiono, A., Sari, D., Khakkam, M., Rizkianah, A., & Gunawan, A. (2023). ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KETERLIBATAN KARYAWAN, DAN KOMUNIKASI EFEKTIF TERHADAP KINERJA ORGANISASI DALAM PEMERINTAHAN KECAMATAN BUARAN.